

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Daerah Istimewa Yogyakarta posisinya terletak diantara $7^{\circ}.33'-8^{\circ}.12'$ Lintang Selatan dan $110^{\circ}.00'-110^{\circ}.50'$ Bujur Timur, tercatat memiliki luas wilayah daratan 3.133,15 km² atau 0,16% dari luas wilayah daratan Indonesia (1.916.906,77 km²). Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi dengan luas wilayah terkecil kedua setelah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang terdiri dari:

1. Kabupate Kulon Progo, dengan luas 586,28 km² (18,71%)
2. Kabupaten Bantul, dengan luas 508,13 km² (16,22%)
3. Kabupaten GunungKidul, dengan luas 1.431,42 km² (45,69%)
4. Kabupaten Sleman, dengan luas 574,82 km² (18,35%)
5. Kota Yogyakarta, dengan luas 32,50 km² (1,04%)

Gambar 4. 1 Peta Wilayah Administratif Provinsi DI Yogyakarta



Sumber: Peta Tematik Indonesia, 2015

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang terdiri atas empat Kabupaten, yaitu Kabupaten Kulon Progo, Gunung Kidul, Bantul, dan Sleman, serta satu kota, yakni kota Yogyakarta yang sekaligus berfungsi sebagai ibu kota provinsi. Penetapan status “istimewa” pada wilayah ini tidak terlepas dari keberadaan system pemerintahan yang masih mempertahankan nilai-nilai historis kesultanan dalam struktur kelembagaannya.

Meskipun memiliki luas wilayah yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan provinsi lain, Daerah Istimewa Yogyakarta tetap menunjukkan potensi yang signifikan, terutama dalam aspek budaya dan sejarah. Keberlanjutan pelestarian nilai-nilai budaya serta warisan Sejarah yang terjaga dengan baik menjadikan wilayah ini memiliki karakteristik yang khas dan berdaya tarik tinggi, baik dalam konteks nasional maupun internasional. Daerah Istimewa Yogyakarta juga memiliki potensi ekonomi yang cukup kuat serta dikenal luas dengan predikat sebagai kota pelajar dan kota budaya. Predikat tersebut menjadikan wilayah ini sebagai salah satu tujuan utama bagi wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, sehingga mampu mendorong peningkatan aktivitas ekonomi daerah.

Dalam konteks tersebut, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki sektor unggulan yang berperan penting dalam menompang perekonomian, yaitu sektor pariwisata. Sektor ini menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi karena kontribusinya yang signifikan terhadap pendapatan daerah. Aktivitas pariwisata di wilayah ini mencakup berbagai jenis, antara lain wisata alam seperti Pantai dan pegunungan, serta wisata budaya yang meliputi peninggalan Sejarah seperti candi dan warisan budaya lainnya.

Berikut gambaran singkat mengenai profil masing-masing dari empat

kabupaten dan satu kota yang menjadi wilayah penelitian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

1. Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta merupakan ibu kota Provinsi DIY dengan luas wilayah paling kecil, yaitu 32,50 km², namun berpenduduk cukup padat sebanyak 438.761 jiwa. Wilayah ini dikenal luas sebagai kota pelajar karena banyaknya perguruan tinggi, sekaligus kota budaya karena keberadaan Keraton Yogyakarta dan kawasan Malioboro yang menjadi pusat kegiatan wisata, perdagangan, dan jasa. Perekonomian kota ini banyak ditopang oleh sektor jasa, pendidikan, dan pariwisata, dengan capaian PDRB sebesar Rp27.014.491 juta.

2. Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul berada di sebelah selatan Kota Yogyakarta dan memiliki garis pantai selatan yang cukup panjang, termasuk kawasan wisata Pantai Parangtritis. Luas wilayahnya mencapai 508,13 km² dengan jumlah penduduk 1.036.489 jiwa. Selain sektor pertanian, Bantul juga dikenal sebagai sentra kerajinan rakyat, seperti gerabah Kasongan dan kerajinan kulit Manding, yang menjadi bagian penting dari perekonomian lokal. PDRB Kabupaten Bantul tercatat sebesar Rp18.838.125 juta.

3. Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman terletak di sisi utara DIY dan berbatasan langsung dengan lereng Gunung Merapi. Wilayah ini memiliki luas 574,82 km² dan merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak, yaitu 1.248.258 jiwa. Sleman dikenal sebagai kawasan pendidikan tinggi karena banyaknya kampus besar, sekaligus pusat pertumbuhan properti, industri kreatif, dan

pariwisata seperti Candi Prambanan dan kawasan Kaliurang. Kabupaten ini tercatat memiliki PDRB terbesar di antara kabupaten/kota lain di DIY, yaitu Rp33.906.373 juta.

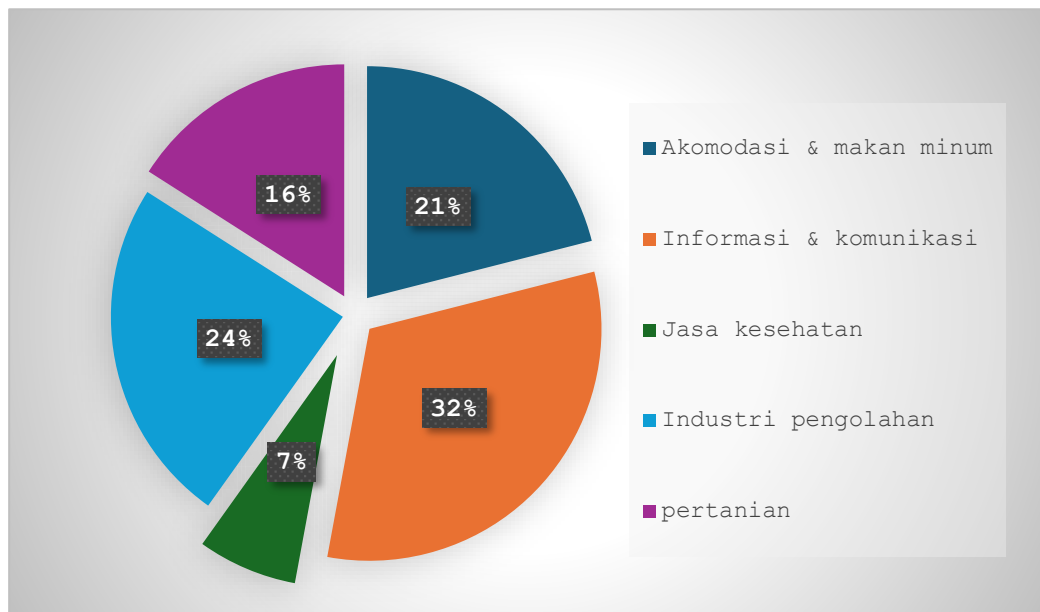
4. Kabupaten GunungKidul

Kabupaten Gunungkidul merupakan wilayah dengan luas terbesar di DIY, yaitu 1.431,42 km², namun sebagian besar berupa dataran karst atau perbukitan kapur yang kurang subur untuk pertanian. Jumlah penduduknya sebanyak 758.316 jiwa. Dalam beberapa tahun terakhir, Gunungkidul berkembang pesat sebagai destinasi wisata pantai selatan, seperti Pantai Indrayanti dan Pantai Baron, yang membantu menggerakkan perekonomian daerah di luar sektor pertanian lahan kering. PDRB Kabupaten Gunungkidul tercatat sebesar Rp13.515.288 juta, dengan laju pertumbuhan PDRB yang relatif paling rendah dibandingkan kabupaten/kota lain di DIY.

5. Kabupaten Kulon Progo

Kabupaten Kulon Progo terletak di bagian barat DIY dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah, dengan luas wilayah 586,28 km² dan jumlah penduduk 437.373 jiwa, yaitu yang paling sedikit di antara kabupaten/kota lainnya. Keberadaan Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) di wilayah ini mendorong berkembangnya kawasan industri, pariwisata, dan investasi baru dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun capaian PDRB-nya paling kecil, yaitu Rp8.414.316 juta, Kulon Progo termasuk wilayah dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tergolong cepat seiring pembangunan infrastruktur strategis tersebut.

Gambar 4. 2 Struktur Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta



Sumber: Data diolah 2024

Dapat dilihat gambar 4.2 Struktur perekonomian Provinsi Yogyakarta tahun 2024 pasca pandemi, sektor Informasi dan Komunikasi menjadi sektor dengan kontribusi terbesar yaitu sebesar 32%. Tingginya kontribusi sektor ini menunjukkan adanya percepatan transformasi digital setelah pandemi, baik dalam bidang pendidikan, perdagangan, maupun pelayanan masyarakat. Selain itu, sektor Industri Pengolahan memberikan kontribusi sebesar 24%, diikuti sektor Akomodasi dan Makan Minum sebesar 21%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas industri dan sektor pariwisata mulai kembali pulih seiring meningkatnya mobilitas masyarakat dan kunjungan wisatawan ke Yogyakarta sebagai daerah tujuan wisata dan kota pelajar.

Di sisi lain, sektor Pertanian memberikan kontribusi sebesar 16% dan sektor Jasa Kesehatan sebesar 7%. Meskipun kontribusi kedua sektor tersebut relatif lebih kecil dibandingkan sektor lainnya, keberadaanya tetap penting dalam

mendukung stabilitas ekonomi daerah. Secara keseluruhan, struktur perekonomian Provinsi Yogyakarta tahun 2024 menunjukkan adanya pergeseran menuju sektor berbasis jasa, teknologi, dan pariwisata sebagai dampak dari proses pemulihan ekonomi pasca pandemi. Hal ini menandakan bahwa perekonomian daerah mulai mampu beradaptasi terhadap perubahan pola aktivitas ekonomi dan kebutuhan masyarakat setelah terjadinya pandemi COVID-19.

4.1.2 Analisis Location Quotient (LQ)

Analisis Location Quotient (LQ) digunakan untuk mengetahui apakah suatu sektor termasuk sektor basis atau non-basis dalam perekonomian Provinsi DI Yogyakarta. Dalam penelitian ini, analisis LQ dilakukan secara terpisah untuk periode pra-pandemi (2015-2019) dan pasca-pandemi (2021-2025), sehingga dapat diperoleh perbandingan yang komprehensif mengenai pergeseran status sektor antara kedua periode tersebut.

Tabel 4. 1 Hasil Analisis Locatio Quotient (LQ) di Provinsi Yogyakarta Periode Pra-Pandemi (2015-2019)

Lapangan Usaha	Hasil LQ	Kategori
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,02	Basis
B. Pertambangan dan Penggalian	0,08	Non Basis
C. Industri Pengolahan	0,61	Non Basis
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,15	Non Basis
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulan	1,22	Basis
F. Konstruksi	1,74	Basis
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,63	Non Basis
H. Transportasi dan Pergudangan	1,25	Basis
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,97	Basis
J. Informasi dan Komunikasi	2,05	Basis
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,94	Non Basis
L. Real Estate	2,51	Basis
M,N. Jasa Perusahaan	0,65	Non Basis
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,20	Basis
P. Jasa Pendidikan	2,87	Basis
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,28	Basis
R,S,T,U. Jasa Lainnya	1,58	Basis

Sumber : Data Diolah (2026)

Berdasarkan tabel 4.1, hasil perhitungan LQ pada periode pra-pandemi menunjukkan terdapat sebelas sektor yang dikategorikan sebagai sektor basis ($LQ > 1$), yaitu sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (1,02); Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, Limbah dan Daur Ulang (1,22); Kontruksi (1,74); Transportasi dan Pergudangan (1,25); Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (2,97); Informasi dan Komunikasi (2,05); Real Estate (2,51); Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (2,20); Jasa Pendidikan (2,87); Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (2,28); serta Jasa Lainnya (1,58). Pada periode ini, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta jasa Pendidikan mencatatkan nilai LQ tertinggi, mencerminkan dominasi aktivitas

pariwisata dan pendidikan sebagai pilar utama perekonomian DIY sebelum pandemi.

Tabel 4. 2 Hasil Analisis Location Quotient (LQ) di Provinsi DI Yogyakarta Periode Pasca-Pandemi (2021-2025)

Lapangan Usaha	Nilai LQ	Kategori
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,09	Basis
B. Pertambangan dan Penggalian	0,06	Non-basis
C. Industri Pengolahan	0,55	Non-basis
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,17	Non-basis
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,14	Basis
F. Konstruksi	1,86	Basis
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,59	Non-basis
H. Transportasi dan Pergudangan	1,15	Basis
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,22	Basis
J. Informasi dan Komunikasi	2,41	Basis
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,86	Non-basis
L. Real Estate	2,41	Basis
M,N. Jasa Perusahaan	0,59	Non-basis
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,1	Basis
P. Jasa Pendidikan	2,99	Basis
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,41	Basis
R,S,T,U. Jasa Lainnya	1,5	Basis

Sumber : Data Diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 4.2, hasil perhitungan LQ pada periode pasca-pandemi menunjukkan bahwa komposisi sektor basis relatif stabil, dengan tetap terdapat sebelas sektor basis. Namun terdapat pergeseran nilai LQ yang signifikan pada beberapa sektor. Sektor Informasi dan Komunikasi mengalami peningkatan nilai LQ dari 2,05 menjadi 2,41, mengindikasikan akselerasi transformasi digital pasca-pandemi. Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum juga meningkat dari 2,97 menjadi 3,22, menandakan pemulihan dan penguatan sektor pariwisata. Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial meningkat dari 2,28

menjadi 2,42, sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap layanan kesehatan. Di sisi lain, sektor Transportasi dan Pergudangan mengalami penurunan dari 1,25 menjadi 1,15 meskipun masih bestatus sektor basis.

Tabel 4. 3 Perbandingan Komparatif Analisis LQ Pra-Pandemi vs Pasca-Pandemi di Provinsi DI Yogyakarta

No	Lapangan Usaha	Pra-Pandemi (2015–2019)		Pasca-Pandemi (2021–2025)		Perubahan Status
		LQ	Kategori	LQ	Kategori	
1	A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.02	Basis	1.09	Basis	Tidak berubah
2	B. Pertambangan dan Penggalian	0.08	Non Basis	0.06	Non Basis	Tidak berubah
3	C. Industri Pengolahan	0.61	Non Basis	0.55	Non Basis	Tidak berubah
4	D. Pengadaan Listrik dan Gas	0.15	Non Basis	0.17	Non Basis	Tidak berubah
5	E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.22	Basis	1.14	Basis	Tidak berubah
6	F. Konstruksi	1.74	Basis	1.86	Basis	Tidak berubah
7	G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0.63	Non Basis	0.59	Non Basis	Tidak berubah
8	H. Transportasi dan Pergudangan	1.25	Basis	1.15	Basis	Tidak berubah
9	I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.97	Basis	3.22	Basis	Tidak berubah
10	J. Informasi dan Komunikasi	2.05	Basis	2.41	Basis	Tidak berubah
11	K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0.94	Non Basis	0.86	Non Basis	Tidak berubah

No	Lapangan Usaha	Pra-Pandemi (2015–2019)		Pasca-Pandemi (2021–2025)		Perubahan Status
		LQ	Kategori	LQ	Kategori	
12	L. Real Estate	2.51	Basis	2.41	Basis	Tidak berubah
13	M,N. Jasa Perusahaan	0.65	Non Basis	0.59	Non Basis	Tidak berubah
14	O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.20	Basis	2.10	Basis	Tidak berubah
15	P. Jasa Pendidikan	2.87	Basis	2.99	Basis	Tidak berubah
16	Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.28	Basis	2.42	Basis	Tidak berubah
17	R,S,T,U. Jasa Lainnya	1.58	Basis	1.50	Basis	Tidak berubah

Sumber: Data Diolah (2026)

Tabel 4.3 menyajikan perbandingan menyeluruh status LQ antara kedua periode. Secara umum, tidak terdapat perubahan status dari basis menjadi non-basis maupun sebaliknya, yang menunjukkan tingkat resiliensi struktural yang tinggi pada sektor-sektor basis DIY. Temuan ini konsisten dengan penelitian Setiawan et al. (2022) yang mengidentifikasi sektor-sektor serupa sebagai sektor basis di DIY. Meskipun status tidak berubah, pergeseran nilai LQ mencerminkan dinamika adaptasi sektoral yang penting untuk dipahami dalam perumusan kebijakan pembangunan ekonomi daerah.

4.1.3 Analisis Dynamic Location Quotient (DLQ)

Analisis Dynamic Location Quotient (DLQ) digunakan untuk menilai prospek perkembangan sektor ekonomi di masa mendatang berdasarkan

dinamika laju pertumbuhan relatif dalam periode 2015–2025. Berikut merupakan hasil perhitungan DLQ untuk seluruh sektor di Provinsi DI Yogyakarta.

Tabel 4. 4 Hasil Analisis Dynamic Location Quotient (DLQ) Provinsi Yogyakarta Tahun 2015-2025

Lapangan Usaha	Hasil DLQ	Keterangan
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	18,36	Prospektif
B. Pertambangan dan Penggalan	1064,67	Prospektif
C. Industri Pengolahan	2,69	Prospektif
D. Pengadaan Listrik dan Gas	4,95	Prospektif
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,65	Tidak Prospektif
F. Konstruksi	1,16	Prospektif
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,41	Prospektif
H. Transportasi dan Pergudangan	0,01	Tidak Prospektif
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,18	Tidak Prospektif
J. Informasi dan Komunikasi	0	Tidak Prospektif
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,32	Tidak Prospektif
L. Real Estate	9,46	Prospektif
M,N. Jasa Perusahaan	0,02	Tidak Prospektif
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9,67	Prospektif
P. Jasa Pendidikan	4,18	Prospektif
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,02	Tidak Prospektif
R,S,T,U. Jasa Lainnya	0,01	Tidak Prospektif

Sumber: Data Diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 4.4 terdapat sembilan sektor yang dikategorikan Prospektif ($DLQ > 1$), yaitu sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (18,36); Pertambangan dan Penggalan (1.064,67); Industri Pengolahan (2,69); Pengadaan Listrik dan Gas (4,95); Konstruksi (1,16); Perdagangan Besar dan Eceran (2,41); Real Estate (9,46); Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (9,67); serta Jasa Pendidikan (4,18). Sedangkan delapan sektor dikategorikan Tidak Prospektif ($DLQ < 1$), meliputi Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Transportasi dan Pergudangan;

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Jasa Perusahaan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; serta Jasa Lainnya.

4.1.4 Matriks Gabungan LQ dan DLQ

Hasil analisis LQ dan DLQ kemudian digabungkan dalam sebuah matriks klasifikasi untuk mengidentifikasi posisi masing-masing sektor, apakah termasuk sektor unggulan, andalan, potensial, atau tertinggal.

Tabel 4. 5 Matriks Gabungan Analisis LQ dan DLQ Provinsi DI Yogyakarta

SLQ/DLQ	DLQ > 1(Prospektif)	DLQ < 1 (Tidak Prospektif)
SLQ > 1	SEKTOR UNGGULAN 1.pertanian,kehutanan,dan perikanan 2.kontruksi 3.real estate 4.administrasi,pertahanan dan jaminan sosial wajib 5.jasa pendidikan	SEKTOR ANDALAN 1.pengadaan air,pengelolaan sampah,limbah dan daur ulang 2.transportasi dan perdagangan 3.penyediaan akomodasi dan makan minum 4.informasi dan komunikasi 5.jasa Kesehatan dan kegiatan sosial 6.jasa lainnya
SLQ < 1	SEKTOR POTENSIAL 1.pertambangan dan penggalian 2.industri pengolahan 3.pengadaan Listrik dan gas	SEKTOR TERTINGGAL 1.jasa keungan dan Asuransi 2.jasa perusahaan

Sumber : Data Diolah (2026)

Sektor Unggulan (LQ > 1 dan DLQ > 1): Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Konstruksi; Real Estate; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; serta Jasa Pendidikan. Sektor-sektor ini memiliki spesialisasi tinggi sekaligus prospek pertumbuhan yang baik sehingga berperan sebagai penggerak utama perekonomian daerah. Sektor Andalan (LQ > 1 dan

DLQ < 1): Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; serta Jasa Lainnya. Sektor-sektor ini masih menjadi sektor basis dengan kontribusi besar, namun pertumbuhannya mulai melambat.

Sektor Potensial (LQ < 1 dan DLQ > 1): Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Sektor-sektor ini belum menjadi sektor basis namun memiliki laju pertumbuhan yang relatif cepat dan berpotensi berkembang. Sektor Tertinggal (LQ < 1 dan DLQ < 1): Jasa Keuangan dan Asuransi serta Jasa Perusahaan. Kedua sektor ini belum menunjukkan perkembangan signifikan dibandingkan wilayah acuan.

4.1.5 Analisis Tipologi Klassen

Analisis Tipologi Klassen digunakan untuk mengelompokkan kabupaten/kota di DI Yogyakarta berdasarkan dua indikator utama, yaitu laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita. Pengelompokan ini dilakukan dengan cara membandingkan masing-masing indikator kabupaten/kota terhadap rata-rata Provinsi DI Yogyakarta, sehingga dapat diketahui posisi relatif setiap wilayah dalam struktur perekonomian daerah. Berikut merupakan hasil pengelompokan Tipologi Klassen kabupaten/kota di DI Yogyakarta.

Tabel 4. 6 Tipologi Klassen Kabupaten/Kota di DI Yogyakarta

Y Pertumbuhan Ekonomi	R PDRB per kapita	
	Y _{rendah}	Y _{tinggi}

R_{tinggi}	Kuadran II - Kulon Progo	Kuadran I - Sleman
R_{rendah}	Kuadran IV - Bantul - Gunung Kidul	Kuadran III - Sleman - Kota Yogyakarta

Sumber : Data Diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 4.6 terdapat pergeseran penting pada Kabupaten Sleman yang bergerak dari kategori Daerah Berkembang cepat (Kuadran II) pada era pra-pandemi menjadi Daerah Cepat Maju dan Cepat Tumbuh pada era Pasca-Pandemi. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sleman berhasil meningkatkan baik laju pertumbuhan ekonomi maupun PDRB per Kapitanya di atas rata-rata provinsi pasca-pandemi, mencerminkan daya lenting dan kapasitas adaptasi yang tinggi.

Kabupaten Kulonprogo tetap berada kategori Daerah Maju Tapi Tertekan pada kedua periode, meskipun dengan dinamika internal yang berbeda. Beroperasinya Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) mendorong peningkatan PDRB per kapita yang signifikan, namun laju pertumbuhan ekonomi relatif masih menghadapi tekanan. Bantul dan Gunungkidul secara konsisten berada pada kategori Daerah Relatif Tertinggal, menunjukkan perlunya intervensi kebijakan yang lebih terarah. Kota Yogyakarta mempertahankan posisi Daerah Berkembang Cepat pada kedua periode

4.1. Pembahasan

4.2.1 Sektor Unggulan di Provinsi DI Yogyakarta

Berdasarkan hasil analisis gabungan *Location Quotient* (LQ) dan *Dynamic Location Quotient* (DLQ), ditemukan lima sektor yang tergolong sebagai sektor unggulan di Provinsi DI Yogyakarta, yaitu sektor-sektor yang memiliki nilai LQ > 1 (sektor basis) sekaligus DLQ > 1 (prospektif). Sektor-sektor tersebut adalah: (1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; (2) Konstruksi; (3) Real Estate; (4) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; serta (5) Jasa Pendidikan. Sektor-sektor unggulan ini tidak hanya menjadi sektor basis yang berkontribusi besar terhadap PDRB, tetapi juga memiliki prospek pertumbuhan yang baik di masa mendatang sehingga berperan sebagai penggerak utama perekonomian daerah.

a. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menempati posisi sebagai sektor unggulan DIY dengan nilai LQ yang Sektor ini membuktikan ketangguhan luar biasa karena tetap mencatat pertumbuhan positif sebesar 4,28% pada tahun 2020 ketika hampir seluruh sektor ekonomi lain mengalami kontraksi akibat pandemi COVID-19. Kabupaten-kabupaten di DIY seperti Sleman, Bantul, dan Gunungkidul masih memiliki basis pertanian yang cukup kuat sehingga menjaga kontribusi sektor ini terhadap PDRB secara konsisten. Aktivitas pertanian di pedesaan juga berfungsi sebagai bantalan sosial-ekonomi bagi masyarakat yang kehilangan mata pencaharian di sektor pariwisata dan jasa selama pandemi berlangsung. Dari sisi kebijakan, Pemerintah DIY secara aktif mendorong penguatan sektor pertanian melalui program Lumbung Mataraman, yakni program ketahanan pangan berbasis desa yang bertujuan meningkatkan produksi pangan lokal dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah. Program ini mendapatkan dukungan DPRD DIY untuk dijadikan *pilot*

project ketahanan pangan nasional. Selain itu, pemerintah menyalurkan bantuan alat mesin pertanian (alsintan), pembangunan irigasi, serta pengembangan pertanian modern berbasis teknologi (DPRD DIY, 2025).

b. Sektor Konstruksi

Sektor Konstruksi mencatat nilai LQ yang terus Data PDRB DIY menunjukkan bahwa sektor konstruksi tumbuh sangat tinggi sebelum pandemi (14,38% pada 2019), mengalami kontraksi terdalam selama pandemi (-15,62% pada 2020), namun pulih secara eksplosif dengan pertumbuhan 10,82% pada tahun 2021 dan berlanjut stabil di kisaran 7-8% pada periode 2024-2025. Meningkatnya nilai LQ menandakan bahwa spesialisasi DIY pada sektor konstruksi semakin menguat dibandingkan rata-rata nasional.

Menurut (Kemenkeu,DJPb 2021), menegaskan bahwa sektor konstruksi menjadi salah satu dari tiga sektor unggulan DIY bersama Informasi dan Komunikasi serta Jasa Pendidikan. Pertumbuhan sektor konstruksi DIY dipicu oleh masifnya pembangunan infrastruktur, antara lain pembangunan jalan tol, pengembangan kawasan wisata, pembangunan hunian mahasiswa dan perumahan, serta infrastruktur pendukung Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) di Kulon Progo. Di tingkat nasional, Pemerintah Pusat melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mendorong percepatan belanja infrastruktur sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi pasca-pandemi. Pemulihan yang terjadi di berbagai sektor termasuk konstruksi mencerminkan aktivitas ekonomi yang mulai bangkit Kembali (PEN, 2021).

c. Sektor Real Estate

Sektor Real Estate mempertahankan posisi sebagai sektor basis Keistimewaan sektor ini terletak pada ketangguhan selama pandemi: sektor real estate adalah satu-satunya sektor yang tetap tumbuh positif sebesar 1,27% pada tahun 2020, ketika sebagian besar sektor lain terperosok dalam kontraksi. Tingginya nilai LQ sektor real estate mencerminkan keunggulan komparatif DIY dalam sektor ini dibandingkan rata-rata nasional. Daya tarik DIY sebagai kota pendidikan dan pariwisata menciptakan permintaan berkelanjutan terhadap hunian bagi mahasiswa, tenaga kerja profesional, dan wisatawan. (Kemenkeu, 2020a) secara eksplisit menetapkan real estate sebagai sektor unggulan DIY berdasarkan laju pertumbuhan dan daya saingnya. Dari sisi kebijakan, Pemerintah DIY mendorong pengembangan kawasan properti yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata dan pendidikan. mencatat bahwa alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan dan real estate semakin marak di DIY, terutama di daerah perkotaan Sleman. Kondisi ini mendorong ekspansi sektor real estate yang didukung oleh kebijakan kemudahan investasi dan pengembangan kawasan strategis pariwisata DIY.

d. Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib

Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib merupakan sektor. Tingginya nilai LQ mencerminkan konsentrasi kegiatan pemerintahan di DIY yang bersifat struktural, mengingat DIY adalah daerah istimewa dengan struktur kelembagaan pemerintahan yang unik dan kompleks. Selama pandemi COVID-19, sektor ini justru menguat karena belanja pemerintah meningkat signifikan dalam rangka penanganan pandemi dan program perlindungan sosial. Pemerintah Pusat menggelontorkan dana PEN dalam

bentuk bantuan sosial, subsidi, dan belanja kesehatan yang disalurkan ke daerah termasuk DIY. (Kemenkeu, 2020b) mencatat bahwa peningkatan belanja pemerintah DIY pada 2020 didorong oleh kebijakan kluster perlindungan sosial program PEN, yang secara langsung menggerakkan sektor administrasi pemerintahan.

e. Sektor Jasa Pendidikan

Sektor Jasa Pendidikan merupakan sektor unggulan paling strategis dan konsisten bagi DIY. Predikat DIY sebagai Kota Pelajar dengan lebih dari 100 perguruan tinggi dan ratusan ribu mahasiswa dari seluruh Indonesia menjadi fondasi struktural yang menjadikan sektor ini tidak tergoyahkan. Secara mengagumkan, sektor jasa pendidikan tidak pernah mencatat pertumbuhan negatif sepanjang periode 2015-2025, bahkan tumbuh positif 4,47% pada 2020 dan 5,00% pada 2021. Hal ini disebabkan perpindahan sistem pembelajaran ke daring yang justru memperluas jangkauan layanan pendidikan dan mendorong investasi infrastruktur digital pendidikan. (Kemenkeu, 2021b) menegaskan bahwa jasa pendidikan merupakan sektor unggulan DIY bersama informasi dan komunikasi serta konstruksi, dengan kontribusi lapangan kerja sebesar 1,35% tenaga kerja DIY.

Pemerintah DIY secara konsisten memprioritaskan sektor pendidikan melalui pengembangan kawasan pendidikan terpadu, fasilitasi kampus baru, beasiswa, dan pembangunan infrastruktur pendukung. (B. Sleman, 2025) menekankan perlunya memanfaatkan keberadaan universitas sebagai pemantik industri berbasis pengetahuan yang mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

4.2.1 Analisis Pergeseran Tipologi Klassen: Fenomena Kabupaten Sleman

Analisis Tipologi Klassen terhadap kabupaten/kota di Provinsi DI Yogyakarta mengungkap pergeseran paling signifikan yang terjadi pada Kabupaten Sleman. Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 4.6, Kabupaten Sleman berpindah dari Kuadran II (Daerah Berkembang Cepat) pada era pra-pandemi (2015-2019) menuju Kuadran I (Daerah Cepat Maju dan Cepat Tumbuh) pada era pasca-pandemi (2021-2025). Pergeseran ini sangat penting karena Kuadran I mensyaratkan dua kondisi sekaligus: laju pertumbuhan ekonomi *dan* PDRB per kapita yang keduanya harus di atas rata-rata provinsi.

Tabel 4. 7 Tipologi Klassen Kabupaten/Kota di DI Yogyakarta (Komparatif Pra-Pandemi dan Pasca-Pandemi)

Kabupaten/Kota	Pra-Pandemi (2015-2019)	Pasca-Pandemi (2021-2025)	Pergeseran
Kabupaten Sleman	Kuadran II (Berkembang Cepat)	Kuadran I (Cepat Maju & Cepat Tumbuh)	II → I
Kota Kulon Progo	Kuadran III (Maju tapi Tertekan)	Kuadran III (Maju tapi Tertekan)	Tetap
Kota Yogyakarta	Kuadran II (Berkembang Cepat)	Kuadran II (Berkembang C epat)	Tetap
Kabupaten Bantul	Kuadran IV (Relatif Tertinggal)	Kuadran IV (Relatif Tertinggal)	Tetap
Kabupaten Gunungkidul	Kuadran IV (Relatif Tertinggal)	Kuadran IV (Relatif Tertinggal)	Tetap

Sumber: Data Diolah (2026)

Pada era pra-pandemi, Sleman hanya memenuhi syarat PDRB per kapita di atas rata-rata provinsi (karena basis PDRB-nya yang besar sebesar Rp 33,9 triliun), tetapi laju pertumbuhannya belum melampaui rata-rata provinsi, sehingga masuk Kuadran II. Pada era pasca-pandemi, Sleman berhasil memenuhi kedua

syarat sekaligus pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita di atas rata-rata DIY sehingga naik ke Kuadran I. mencatat bahwa perekonomian Sleman tumbuh sebesar 5,09% pada 2023, dengan PDRB per kapita yang secara konsisten di atas rata-rata DIY. Faktor-Faktor penyebab pergeseran kabupaten sleman sebagai berikut:

1. Akselerasi Transformasi Digital dan Dominasi Sektor Informasi dan Komunikasi

Kabupaten Sleman merupakan pusat perkembangan ekonomi digital di DIY (Perkim.id, 2023) mencatat bahwa Sektor Informasi dan Komunikasi menjadi salah satu dari tiga penyumbang PDRB terbesar Sleman pada 2023, mencapai Rp 5,86 triliun atau sekitar 15% dari total PDRB. Pandemi COVID-19 justru mengakselerasi sektor ini karena lonjakan permintaan layanan digital, *e-commerce*, edukasi daring, dan layanan kesehatan digital. Banyaknya perusahaan teknologi, startup digital, dan ekosistem bisnis berbasis digital di Sleman memperkuat posisi kabupaten ini dalam memanfaatkan momentum transformasi digital nasional.

2. Pemulihan Pariwisata yang Kuat dan Kebijakan Stimulus Ekonomi

Kabupaten Sleman memiliki fasilitas pariwisata dan akomodasi terlengkap di DIY, mencakup hotel berbintang, resort, restoran, serta destinasi wisata alam Lereng Merapi dan Candi Prambanan. Pemerintah Kabupaten Sleman menetapkan langkah pemulihan ekonomi pasca-pandemi yang meliputi promosi destinasi wisata, stimulus modal bagi UMKM, pelatihan peningkatan nilai tambah pendapatan, dan program padat karya. Radar Jogja (2021) melaporkan bahwa Pemkab Sleman memfokuskan kebijakan pada penguatan UMKM, pariwisata, dan pertanian dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi. Sektor akomodasi

dan makan minum Sleman turut menggerakkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan sehingga mendorong laju pertumbuhan melampaui rata-rata provinsi.

3. Ekosistem Perguruan Tinggi sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pengetahuan

Sleman merupakan kabupaten dengan konsentrasi perguruan tinggi tertinggi di DIY, antara lain UGM, UII, UPN, dan puluhan kampus lainnya. Ekosistem kampus ini menciptakan efek multiplier yang signifikan melalui konsumsi mahasiswa, belanja operasional kampus, penelitian dan pengembangan, serta inkubasi startup dan usaha kreatif.(R. Sleman, 2025) menekankan perlunya memanfaatkan keberadaan universitas sebagai pemantik industri berbasis pengetahuan. Sektor jasa pendidikan yang tumbuh konsisten selama dan pasca-pandemi berkontribusi langsung pada peningkatan PDRB Sleman di atas rata-rata provinsi.

4. Pembangunan Infrastruktur Strategis dan Masifnya Investasi

Pasca-pandemi, Kabupaten Sleman mendapatkan arus investasi yang sangat besar dari pemerintah maupun swasta. Pembangunan infrastruktur strategis seperti jalan tol, perumahan, kawasan industri, dan properti mendorong pertumbuhan sektor konstruksi dan real estate secara signifikan. mencatat bahwa sektor konstruksi menjadi kontributor terbesar kedua PDRB Sleman dengan nilai Rp 4,68 triliun (12%) pada 2023.(Krijogja.com, 2024) melaporkan bahwa adanya proyek strategis nasional pembangunan jalan tol diharapkan semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sleman.

4.2.2 Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil analisis Location Quotient (LQ), Dynamic Location Quotient (DLQ), dan Tipologi Klassen, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu memprioritaskan kebijakan pembangunan pada sektor-sektor yang terbukti memiliki keunggulan komparatif sekaligus prospek pertumbuhan yang baik. Sektor-sektor tersebut perlu didukung melalui peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur, penguatan kualitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi dan inovasi agar mampu meningkatkan produktivitas dan memberikan efek pengganda (*multiplier effect*) terhadap sektor ekonomi lainnya. Selain itu, sektor yang masih memiliki potensi berkembang perlu memperoleh dukungan berupa kemudahan investasi, penguatan kemitraan usaha, dan pengembangan kapasitas sehingga dapat meningkatkan daya saing dan bertransformasi menjadi sektor unggulan di masa mendatang.

Hasil Tipologi Klassen yang menunjukkan adanya perubahan tingkat perkembangan wilayah setelah pandemi mengindikasikan perlunya kebijakan pembangunan yang lebih terarah dan berbasis karakteristik daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah DIY perlu memperkuat pemerataan pembangunan melalui peningkatan konektivitas antarwilayah, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta optimalisasi sinergi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat. Kebijakan tersebut diharapkan tidak hanya mampu mempercepat pemulihan ekonomi pasca-pandemi, tetapi juga menciptakan struktur perekonomian daerah yang lebih tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa yang akan datang.